

Education in the Midst of Indonesia's Development Agenda

Rizqyansyah Fitramadhana¹

¹Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia

Email: fitramadhanarizqyansyah@gmail.com

Abstract

President Jokowi made a shocking decision in his second term by pointing to Nadiem Makarim as Minister of Education, Culture, Research, and Technology. Not long after his appointment, Nadiem Makarim released Merdeka Belajar and Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, which is significant to Indonesia's education context. Those two stipulations alone indicate exponential change within education governance in Indonesia. Various notable scholars later argue that Nadiem Makarim's policy is intriguing and essential, emphasizing their support for Merdeka Belajar and Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. A glance at scientific articles published right after enacting these two policies shows that many, if not most, researchers agree thoroughly with Nadiem Makarim. In contrast with the previous undertaking, this study uses critical explanations to expose and unearth the interest lurking beneath the so-called neutral policy agenda. To support the aim of this research, a critical policy study paradigm will be used along with the critical discourse analysis of Norman Fairclough. There are two significant findings from an in-depth search of the study of the text production process, text analysis, and interpretation of discourse and social practices of education policy during the Jokowi era. First, in the eye of Jokowi's administration, education is part of the development business. Education, in short, is seen as a proper tool (a) to adapt to the current condition of the knowledge-based economy and to cultivate human resources and (b) to build a young generation (Profil Pelajar Pancasila) who can thrive in the changing world without losing its grip on Pancasila as the main symbol of Indonesia. Second, Jokowi's education discourses and social practices are spurred by the urgent need to reskill, upskill, and enhance the employability of both workers and future workers. These two propositions are corroborated by the production of texts that are thick with institutional interests in the form of increasing human capital for Indonesia's Vision 2045, text analysis that shows the dominance of representation of human resource development interests in various policy documents in Indonesia, and interpretation of discourse that hints at the existence of link and match hegemony in human resource development projects as well as efforts to align cognitive and ethical aspects through the P5 program.

Keywords: Critical Discourse Analysis; Knowledge-Based Economy; Development; Education.

Pendidikan di Dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Abstrak

Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi melakukan gebrakan dalam dunia pendidikan dengan menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek. Tak lama berselang, Nadiem Makarim meresmikan kebijakan Merdeka Belajar serta merintis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang sangat signifikan bagi lanskap pendidikan di Indonesia. Dua momen tersebut menandakan sebuah perubahan seismik dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Menanggapi terobosan itu banyak pihak menyatakan dukungannya. Artikel ilmiah yang terbit setelah Merdeka Belajar diresmikan lebih banyak berpihak pada upaya pemerintah. Berlawanan dengan tren tersebut, kajian ini mencoba menghadirkan pembahasan kritis mengenai kebijakan pendidikan di masa Jokowi—khususnya pada periode kedua pemerintahannya. Untuk mendukung tujuannya, penelitian ini menggunakan paradigma studi kebijakan kritis yang dikombinasikan dengan metodologi analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Dari penelusuran mendalam tentang studi terhadap proses produksi teks, analisis teks, dan interpretasi wacana serta praktik sosial kebijakan pendidikan pada masa Jokowi, terdapat dua temuan penting. Pertama, dalam agenda pembangunan Indonesia, pendidikan diposisikan sebagai (a) alat untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan menciptakan sumber daya manusia unggul (b) serta membangun Profil Pelajar Pancasila yang atentif terhadap perkembangan zaman dan peduli pada pelestarian identitas khas bangsa Indonesia. Kedua, diskursus dan praktik sosial pendidikan tersebut digulirkan agar pekerja dan calon pekerja dapat beradaptasi dengan profil keterampilan baru. Dua proposisi tersebut dibuktikan oleh produksi teks yang kental dengan kepentingan institusional berupa peningkatan sumber daya manusia unggul untuk Visi Indonesia 2045, analisis teks yang menunjukkan dominasi representasi kepentingan pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai dokumen kebijakan di Indonesia, dan interpretasi wacana yang mengisyaratkan eksistensi hegemoni link and match dalam proyek pembangunan sumber daya manusia serta upaya penyesuaian aspek kognitif dan budi pekerti lewat program P5.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis; Ekonomi Berbasis Pengetahuan; Pembangunan; Pendidikan.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu agenda utama Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam RPJMN 2020-2024, pendidikan menjadi isu yang bergandengan dengan wacana penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Pada sidang kabinet di Istana Negara bulan Oktober tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa program tahun pertama periode pembangunan RPJMN 2020-2024 akan difokuskan kepada pembangunan SDM secara besar-besaran (Handini, Zulkifli, Hidayat, & Herlina, 2021).

Pada tataran kebijakan, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menjalankan kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas. Pada tingkatan dasar dan menengah, frasa “Merdeka Belajar” lebih populer sedangkan pada level perguruan tinggi kata “Kampus Merdeka” sering dipakai meski sebenarnya Kampus Merdeka merupakan satu bagian dari Merdeka Belajar. Menyitir kanal resmi Kemendikbudristek, Kampus Merdeka membawahi delapan program pokok yakni Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Praktisi Mengajar, Bangun Kualitas

Manusia Indonesia (Bangkit), dan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya). Sementara itu, Merdeka Belajar diterjemahkan ke dalam rentetan kebijakan seperti Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dsb.

Tak lama setelah peresmian Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Kemendikbudristek melempar wacana Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 serta perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Secara umum, pembuatan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dimaksudkan agar Indonesia memiliki pegangan utuh dalam aspek pendidikan. Fungsi utama Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 adalah penunjuk jalan atau kompas sehingga harapannya, dengan adanya dokumen cetak biru tersebut, kebijakan pendidikan Indonesia tidak mudah berubah seiring bergantinya menteri atau presiden. Di sisi yang lain, pengusulan UU Sisdiknas ditujukan untuk memperringkas peraturan mengenai pendidikan serta berfungsi sebagai salah satu medium kesejahteraan tenaga pengajar. Namun, niat “baik” itu belum bisa terwujud. Banyak entitas, utamanya kelompok masyarakat sipil dan guru, yang masih ragu dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dan UU Sisdiknas. Meski masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, dua wacana tersebut membuktikan derap langkah tegas yang sedang disusun pemerintah berkenaan dengan dimensi pendidikan.

Dibahasnya topik pendidikan di dalam RPJMN, dirintisnya kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, serta digulirkannya wacana cetak biru pendidikan nasional pada taraf selanjutnya menarik perhatian akademisi dan pemerhati pendidikan. Sebagian besar menaruh simpatik, ada juga yang melayangkan kritik. Mereka yang berpihak pada Kemendikbudristek mengapresiasi kebijakan Kampus Merdeka sebagai terobosan baru guna menghadapi era Revolusi Industri 4.0 (Siregar, Sahirah, & Harahap, 2020), mendeskripsikan Merdeka Belajar sebagai strategi untuk mewujudkan kualitas SDM Indonesia (Dharma & Sihombing, 2020), menguraikan relevansi Merdeka Belajar untuk mencapai pendidikan yang ideal, serta mendukung pembuatan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 (Jayanti, Setiawan, Azhari, & Putri Siregar, 2021). Di sisi yang lain, entitas yang berseberangan mengkritik habis tendensi industrial Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Kodrat, 2021) dan hegemoni pasar kerja serta penetrasi neoliberal yang mengkerangkai Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 (Kusumadewi, 2022).

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, pendidikan merupakan arena pertarungan yang selalu ramai oleh hingar-bingar wacana dan praktik. Baik individu, masyarakat sipil, maupun pemerintah, semua sepakat bahwa pendidikan adalah ikhwal penting yang harus terus dihidupi. Sayangnya, pembahasan kritis mengenai kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia pada masa Jokowi masih jarang ditemukan. Mayoritas kajian tampak sepakat mendukung kebijakan pendidikan pemerintah Jokowi. Kalaupun ada kritik terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, bentuk sanggahannya tampil dalam bingkai yang parsial dan terkesan setengah-setengah. Selayang pandang, belum ada rasanya riset yang mencoba membuka kotak pandora kebijakan pendidikan ala Jokowi. Riset ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan alternatif penjelasan tentang posisi pendidikan dalam program pembangunan setelah Jokowi menjabat sebagai presiden.

Secara khusus, kajian ini bertujuan menganalisis narasi beserta praktik kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia pada periode kekuasaan Jokowi. Fase pemerintahan Jokowi dipilih karena pada masa ini terjadi perumusan dan pelaksanaan

masif program pendidikan. Hal ini tentu tidak secara otomatis mengkerdilkan produksi pengetahuan dan kebijakan pendidikan di masa-masa sebelumnya. Periode pemerintahan SBY, semisal, merupakan salah satu momen emas pendidikan di Indonesia. Namun, karena studi ini membatasi diri pada momen pemerintahan Jokowi maka analisis mengenai diskursus dan kebijakan pendidikan pada era SBY tidak akan dibahas secara panjang lebar. Tercatat, hanya ada satu dokumen pendidikan pada masa SBY yang menjadi referensi dalam studi ini, yaitu MP3EI. Selain manuskrip tersebut, kajian ini fokus pada wacana dan kebijakan pendidikan pada era Jokowi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang coba diangkat oleh penelitian ini adalah: (a) diskursus dan praktik sosial macam apa yang dominan dalam diskursus dan praktik pendidikan Indonesia pada era Jokowi? (b) mengapa narasi dominan tersebut menjadi problem pokok yang digamit oleh pemerintah pusat?

Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek *methodological novelty*. Berlawanan dengan kajian-kajian pendidikan sebelumnya, riset ini mengkombinasikan studi kebijakan kritis dan analisis wacana kritis. Selama ini, upaya sintesis antara keduanya masih jarang ditemukan dalam kajian kritis terhadap pendidikan. Kajian yang dilakukan oleh Teguh Wijaya Mulya, misalnya, menggunakan analisis dokumen dan pengalaman reflektik untuk menyelidiki operasi neoliberalisme di fakultas psikologi di Indonesia (Mulya, 2016). Di tempat lain, Edi Subkhan mendayagunakan studi pustaka dan wawancara mendalam yang dikombinasikan dengan analisis kritis sebagai landasan untuk menguraikan bahaya kepatuhan berlebih kepada paradigma *link and match* (Subkhan, 2023). Nurdiana Gaus, di sisi yang lain, banyak memberdayakan analisis dokumen, studi kasus, wawancara mendalam guna menelusuri dampak dari berlakunya *neoliberal governance* pada identitas penghuni kampus serta interogasi kritis terhadap kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia (Gaus & Hall, 2015; Gaus, Yunus, Karim, & Sadia, 2019). Sementara itu, Andrew Rosser menguliti ekonomi-politik kebijakan universitas di Indonesia menggunakan studi kebijakan kritis (Rosser, 2016).

Dari lima penelitian tersebut, tampak bahwa belum ada yang menggabungkan analisis wacana kritis dan studi kebijakan kritis. Meskipun sama-sama meneropong pendidikan dari perspektif kritis, penelitian ini membedakan diri pada dimensi analisis data. Menggunakan *critical discourse analysis* dan *critical policy study*, kajian ini bersandar pada kombinasi antara analisis kritis terhadap teks dan pembredelan konteks ekonomi-sosial-politik yang melingkupi produksi teks. Artinya, berbeda dari kajian sebelumnya, penelitian ini menaruh fokus pada aspek bahasa (tekstual) serta bagaimana ia difungsikan untuk memenuhi tujuan atau kepentingan tertentu. Jadi, kendati memiliki spirit kritis yang sama dengan penelitian sebelumnya, kajian ini mendasarkan diri pada pemahaman bahwa intensi kritis itu dapat dipenuhi lewat analisis terhadap aspek-aspek tekstual dokumen kebijakan (genre, jumlah kata, organisasi teks, pemilihan konsep, pemilihan jenis kalimat) dan uraian kontekstual produksi teks kebijakan. Seiring sejalan dengan gagasan CDA, riset ini berargumen bahwa bahasa merupakan salah satu medium reproduksi kekuasaan, sehingga analisis kritis terhadap bekerjanya bahasa di dalam dimensi kehidupan publik (termasuk di sini kebijakan pendidikan) mutlak diperlukan agar keadilan sosial dan kemaslahatan bersama dapat terjamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud menganalisis secara kritis narasi dan kebijakan pendidikan Indonesia pada pemerintahan Jokowi. Karena menitikberatkan pada pembahasan kebijakan, kajian ini menggunakan cara pandang studi kebijakan kritis (*critical policy analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Menurut Sandra Taylor, studi kebijakan kritis berupaya menyingkap kerja ideologi yang berada di dalam teks kebijakan (Taylor, 1997). Secara khusus, studi kebijakan kritis ingin mengetahui bagaimana masalah dan solusi atasnya direpresentasikan, dipadupadankan, dan dikombinasikan di dalam dokumen kebijakan (Taylor, 2004).

Sementara itu, analisis wacana kritis Norman Fairclough fokus pada aspek linguistik dan sosial yang tampak dalam teks. Dimensi linguistik yang diperhatikan berupa *genre, discourse, styles, text organization, clause combination, semantic features, words* (Fairclough, 2003). Di sisi yang lain, entri sosial yang dimaksud adalah struktur sosial dan budaya, relasi serta proses produksi teks terkait (Fairclough, 2001). Dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough, teks dan konteks selalu berjalan berdampingan; keduanya bersifat dialektis (Fairclough, 2013). Maksudnya, apa yang tertulis di dalam teks selalu ada kaitannya dengan proses produksi yang melibatkan struktur sosial dan budaya di luar teks. Unsur tekstual yang membentuk diskursus merupakan manifestasi dari *order of discourse*. *Order of discourse* selalu berkaitan dengan *social order* yang membentuknya. Dalam bentala AWK, *social order* dipahami sebagai entitas berkuasa yang ingin memenangkan konsensus atas konstituen di bawahnya melalui strategi diskursus. *Discourses* (wacana dalam bentuk jamak), dengan demikian, adalah salah satu strategi *social order* untuk meneguhkan kekuasaannya melalui implementasi kebijakan (Fairclough & Fairclough, 2012).

Secara kontekstual, riset ini tidak mendayagunakan semua elemen analisis wacana kritis yang diuraikan di atas. Beberapa unsur krusial seperti *genre, discourse, text organization*, serta *words* akan muncul ketimbang dimensi lain. Dalam kajian ini, *genre* difungsikan untuk menelisik strategi menghubungkan bagian-bagian teks, *discourse* dipakai guna mencari tahu representasi hegemonik yang diukir di dalam teks, *text organization* berguna untuk mengetahui struktur narasi teks, dan *words* dipergunakan untuk menelusuri kosakata dominan yang dipakai di dalam teks. Semua piranti yang baru saja dijelaskan diintrodusir guna mencapai tujuan studi kebijakan kritis, yakni mengetahui bagaimana masalah dan solusi atasnya direpresentasikan, dipadupadankan, dan dikombinasikan di dalam dokumen kebijakan.

Beranjak ke dalam urusan teknis, penelitian ini menggunakan data sekunder secara penuh. Sumber data yang digunakan adalah artikel, buku, dokumen kebijakan, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan isu kebijakan pendidikan pada masa Jokowi dan diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beberapa dokumen kunci yang digunakan dalam kajian ini adalah *Visi Indonesia 2045; Pendidikan Tinggi, Kemarin, Kini, dan Esok; Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila; Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran; Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035; Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*.

Teknik analisis data mengikuti alur yang biasa digunakan di dalam penelitian kualitatif. Pada awalnya, berbagai data sekunder yang berkaitan dengan fokus kajian dikumpulkan. Selanjutnya, kumpulan dokumen dan manuskrip yang sudah ditata rapi dibaca. Lalu, usai dibaca, bagian penting dari teks dikelompokkan ke dalam berbagai macam kategori yang sudah ditentukan. Proses ini dinamakan sebagai koding data. Sesudah melakukan koding data, penulis menentukan *genre*, *discourse*, *text organization*, dan *words* yang digunakan di dalam manuskrip. Ragam komponen tekstual tadi kemudian ditarik lebih jauh menuju konteks eksternal yang mempengaruhi produksi teks. Ketersambungan antara teks dan konteks eksternal yang menyusunnya pada akhirnya akan menunjukkan kepentingan dan kerja ideologi dokumen kebijakan pendidikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Perubahan: Justifikasi dan Rasionalisasi Kebutuhan Atas Pendidikan

Transformasi radikal selalu berawal dari krisis. Kondisi kritis yang menyelimuti krisis menciptakan *sense of urgency*. Dalam keadaan terdesak, keputusan gawat darurat mesti dikeluarkan. Walau terkadang kebijakan tersebut tampak sulit dilaksanakan, rasa ketakutan akan ketertinggalan (*fear of missing out*) yang bercampur dengan keharusan beradaptasi pada akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan aksi nyata lewat reformasi kebijakan.

Dalam dunia pendidikan, krisis itu mewujud pada empat bentuk utama: perkembangan teknologi dan informasi, perubahan demografi, tren ketenagakerjaan, serta dominannya ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) (OECD, 1996). Hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) dan bayang-bayang otomasi, implementasi fleksibilitas tenaga kerja, tren demografi, serta perubahan gradual struktur keterampilan kerja membawa pendidikan naik ke panggung utama (Wang, 2011). Menghadapi segala macam tantangan tersebut, pendidikan dituntut untuk mengambil peran. Secara umum, pendidikan diposisikan sebagai entitas sentral untuk meningkatkan daya saing bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang merata, serta menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni (Wang, 2011).

Analisis Teks

Di Indonesia, pendidikan dihadapkan dengan krisis yang tak jauh berbeda. Dalam berbagai dokumen dan presentasi, Indonesia digambarkan sedang mengalami berbagai tantangan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi, perubahan demografi, tren ketenagakerjaan, serta dominannya ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Untuk menatap deretan tantangan tersebut, pendidikan hampir selalu diwacanakan sebagai ujung tombak. Visi Indonesia 2045 yang dicanangkan pemerintahan Jokowi menguraikan dengan jelas tendensi tersebut: "Ekonomi berbasis pengetahuan yang semakin meningkat bertumpu pada inovasi teknologi, mensyaratkan penduduk berpendidikan lebih tinggi dan menguasai iptek."

Narasi yang pertama kali diafirmasi adalah ekonomi berbasis pengetahuan. Implementasi keterampilan pengetahuan teoretis yang menjadi dasar ekonomi berbasis pengetahuan memaksa Indonesia meninjau kembali kualifikasi tenaga kerja saat ini:

“Untuk menopang struktur ekonomi modern yang berbasis pada industri diperlukan *skilled labor force*. Tenaga kerja perlu memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan, keterampilan teknis, serta kecakapan hidup dan jiwa kewirausahaan.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Kedatangan ekonomi berbasis pengetahuan bersama keperluan modifikasi kecakapan tenaga kerja menciptakan kebutuhan baru berupa pelayanan pendidikan dan pelatihan seperti yang tertera pada kutipan di bawah ini:

“Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang meningkat, kebutuhan tenaga kerja yang terampil semakin tinggi. Tuntutan untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan untuk jenis-jenis keahlian dan keterampilan tertentu meningkat dan harus dipenuhi.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Apabila dicermati betul, tiga kutipan di atas secara berurutan menghadirkan ragam tantangan dan solusi yang dapat dilakukan. Tantangan tersebut memusat pada struktur keterampilan tenaga kerja yang berubah, ekonomi berbasis pengetahuan, dan penguasaan iptek. Solusi yang kemudian muncul adalah pendidikan. Di situ pendidikan ditempatkan sebagai medium guna “membangun bangsa yang maju, modern, dan sejahtera” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Visi Indonesia 2045, secara umum, menjahit substansi dan penjelasan yang dirangkai mengikuti alur berikut: *problem* → *solusi*. Permasalahan sengaja diungkapkan pada awal naskah untuk merangsang tanggapan. Selanjutnya, manuskrip berlanjut pada penguraian solusi atas permasalahan yang ada.

Beranjak ke dokumen yang lain, struktur narasi serupa juga ditemukan. Dalam manuskrip Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, alur penjelasan yang ditulis mengikuti urutan kronologi: *krisis* atau *permasalahan* → *pendidikan* sebagai *solusi* → *kebijakan pendidikan*. Lembaran-lembaran awal Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, contohnya, diisi oleh deskripsi tren global dan masa depan pembelajaran. Terdapat tiga perkembangan yang diprediksi bakal mempengaruhi pendidikan: teknologi, sosio-kultural, dan lingkungan. Pada lanskap teknologi, penerapan otomatisasi, AI, dan mahadata akan berdampak pada “tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan. Para pekerja dari berbagai sektor perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan mereka untuk tetap kompetitif” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Diantara sekian banyak keahlian, “kemampuan memecahkan masalah, kognitif, dan sosial akan menjadi penting, kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses, dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Sementara itu, pada lanskap sosio-kultural, perubahan paling kentara adalah kondisi demografis. Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Terakhir, pada aras lingkungan, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan “habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, dan naiknya permukaan air laut”.

Tiga variasi permasalahan yang dijelaskan di atas kemudian ditutup dengan sebuah kesimpulan: Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan

kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045. Darimana SDM itu dihasilkan? Tentunya dari sektor pendidikan. Di sini pendidikan dihadirkan sebagai *deus ex machina*. Pendidikan dipercaya mampu menelurkan SDM yang menopang agenda pembangunan di Indonesia. Sayangnya, menurut substansi pembahasan Peta Jalan Pendidikan Indonesia, kondisi pendidikan Indonesia saat ini belum mumpuni. Hal itu ditandai dengan rentetan masalah yang didedah secara panjang lebar di dalam manuskrip Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Masalah itu diantaranya adalah (a) adanya kesenjangan di tingkat prasekolah dan pendidikan tinggi, (b) hasil pendidikan dasar dan menengah kurang memadai dibuktikan dengan skor PISA Indonesia, (c) kualitas guru-guru di Indonesia masih belum maksimal, (d) infrastruktur yang tidak memadai, (e) ketimpangan kualitas antara Pulau Jawa dan daerah lainnya, (f) *missmatch* pendidikan tinggi dan industri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Berdasarkan senarai prahara pendidikan yang disebutkan tersebut, Kemendikbudristek lalu mencanangkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia sebagai obat penawar. Di situ disebutkan bahwa Visi Pendidikan Indonesia 2045 adalah “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”. Pada tataran dasar dan menengah, visi itu diterjemahkan melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Sementara itu, untuk level universitas, visi besar tersebut diimplementasikan lewat kebijakan Kampus Merdeka.

Interpretasi Wacana

Dua publikasi yang baru saja diulas tadi menegaskan bahwa untuk menjalankan transformasi kebijakan pendidikan, pemerintah Jokowi terlebih dahulu memperkenalkan deretan tren yang mau tak mau mesti direngkuh oleh Indonesia. Kecenderungan-kecenderungan global tersebut dibaca sebagai krisis yang mengharuskan Indonesia menciptakan tata kelola pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam berbagai halaman dokumen *Visi Indonesia 2045* dan *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*, kita dapat dengan mudah menemukan senarai kondisi kontemporer yang dipakai sebagai rasionalisasi untuk melakukan reformasi kebijakan pendidikan.

Dari sini dapat dipahami bahwa penjelasan tren terkini pada dasarnya berfungsi guna “membuka jalan”. Wacana perkembangan teknologi dan informasi, perubahan demografi, tren ketenagakerjaan, serta dominannya ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) merupakan pendahuluan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengatakan bahwa gentingnya kondisi saat ini menuntut kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas. Artinya, melalui pengudaran tren masa kini, pemerintah berupaya untuk menjustifikasi kebutuhan terhadap pendidikan.

Dalam kajian sosiologi pendidikan, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa disejajarkan dengan fenomena “*discourse of change*” di Inggris. Sama seperti “*discourse of change*”, narasi tren masa kini yang digelorkan oleh pemerintah Jokowi sebenarnya merupakan cara memperluas batasan, menciptakan ruang untuk bertindak, menyingkirkan kemungkinan lain, melegitimasi suara baru, mengatribusi sebab dan akibat, serta membuat sebuah hal menjadi tampak natural dan tak terhindarkan (Ball, 2007). Diskursus perubahan yang dijahit secara rapi di dalam dokumen *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035* dan *Visi Indonesia 2045* tidak hanya berfungsi untuk

menyampaikan informasi. Lebih dari itu, diskursus perubahan diukir guna mempromosikan adanya situasi gawat darurat yang tidak bisa ditawar lagi. Karena sudah terlampau genting maka pembaca diminta menerima kenyataan itu secara apa adanya. Atau, dengan kata lain, pembaca disuguhkan dengan narasi yang seolah-olah menganggap perubahan berupa ekonomi berbasis pengetahuan sebagai “given”.

Secara implisit, teks *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035* dan *Visi Indonesia 2045* ingin mengatakan bahwa perubahan berupa ekonomi berbasis pengetahuan merupakan fakta yang membutuhkan penyesuaian dan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan adaptabilitas agar bisa terus berkompetisi di lintasan pacuan global. Berdasarkan penelusuran atas dua dokumen tersebut, keduanya memang dirancang untuk menjustifikasi dan merasionalisasi penyesuaian dan reformasi terhadap perubahan global. Dalam konteks penelitian ini, derap langkah penyesuaian dan reformasi difokuskan pada aspek pendidikan. Selain itu, *Visi Indonesia 2045* dan *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* secara bersamaan juga berniat mengatur ulang cara pandang atau paradigma pendidikan di Indonesia serta menyingkirkan alternatif fungsi pendidikan. Hal itu, contohnya, dapat diketahui dari upaya getol pemerintah memasukkan pendidikan sebagai salah satu pendukung agenda pembangunan serta pernyataan yang seolah-olah menyempitkan kegunaan pendidikan tinggi pada arah penyiapan tenaga kerja terampil. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Pendidikan di Dalam Agenda Pembangunan I: Ekonomi Berbasis Pengetahuan, Penciptaan Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkatan Produktivitas

Pendidikan dan pembangunan adalah dua pasang konsep yang saling melengkapi. Pada era pemerintahan Jokowi, pendidikan digunakan sebagai salah satu instrumen pembangunan. Secara khusus, fungsi pendidikan di dalam pembangunan Indonesia pada masa Jokowi adalah menciptakan dan membentuk sumber daya manusia unggul yang dapat membantu Indonesia mencapai Visi Indonesia Emas 2045, meningkatkan produktivitas, serta membantu penyesuaian diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada bagian ini, diuraikan mengapa (rasionalisasi) dan bagaimana (praksis sosial) pendidikan dipupuk sebagai alat untuk mencapai tiga fungsi tersebut.

Dalam kerangka berpikir analisis wacana kritis, diskursus merupakan salah satu elemen vital untuk meyakinkan warga negara, menggalang konsensus, dan menyemai hegemoni. Diskursus mesti dipahami sebagai upaya menciptakan representasi mengenai sesuatu, bagaimana cara mencapainya, dan apa yang seharusnya dilakukan (Fairclough, 2013). Dengan kata lain, diskursus tidak hanya membicarakan masa kini, tapi juga masa lalu dan masa depan. Kondisi masa lalu dan kini dijadikan landasan untuk mengimajinasikan masa depan. Diskursus, dengan demikian, merupakan keadaan yang didambakan terjadi. Pada taraf selanjutnya, diskursus menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan dan melaksanakannya dalam perbuatan.

Produksi Teks

Berkaitan dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan sangkut pautnya pada bidang pendidikan di Indonesia, diskursus yang dijalankan pemerintah Jokowi sangatlah krusial. Melalui wacana ekonomi berbasis pengetahuan, pemerintah Jokowi mampu membuat konstruksi representasi atas dimensi pendidikan di Indonesia.

Maksim ekonomi berbasis pengetahuan, secara teoretis, fokus pada dimensi ekonomi dari pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, produksi barang dan jasa didominasi oleh inovasi yang bersumber dari pengaplikasian riset dan pengembangan (R&D) (David & Foray, 2002). Inovasi atau temuan tersebut kemudian dikodifikasi dalam bentuk aset tak terlihat seperti hak cipta, properti intelektual, merek dagang, dan paten (Harris, 2001). Deretan aset tak terlihat itu sangat bernilai karena dapat diperjualbelikan. Dalam konteks korporasi, ekonomi berbasis pengetahuan sangat vital sebab inovasi dapat menstimulasi metode produksi yang lebih efisien dan meningkatkan produk serta layanan (OECD, 1996).

Profil keuntungan tersebut kemudian mendorong OECD dan World Bank meneliti faktor pendukung intensifikasi ekonomi berbasis pengetahuan. World Bank, misalnya, mengidentifikasi empat pilar ekonomi berbasis pengetahuan: struktur institusi yang menyediakan insentif kepada kewirausahaan dan penggunaan pengetahuan, ketersediaan pekerja terampil dan sistem pendidikan yang bagus, akses pada infrastruktur teknologi dan informasi, lanskap inovasi yang mencakup akademisi, sektor privat, dan masyarakat sipil (Chen & Dahlman, 2006). Dari keempat syarat yang disampaikan World Bank, pekerja dengan keterampilan tinggi dan sistem pendidikan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan (World Bank, 2003). Tak jauh berbeda, OECD juga mengungkapkan hal serupa. Dalam berbagai publikasinya, OECD menggarisbawahi modal manusia dan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (OECD, 1996, 2018, 2021). Bagi OECD dan World Bank, dengan demikian, pendidikan mesti difungsikan guna membantu perancangan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam benak OECD dan World Bank, pendidikan adalah piranti utama untuk mengejar kepentingan ekonomi.

Sekarang, kalau kita melihat wacana yang dirangkai oleh pemerintah Jokowi, arahnya hampir sama seperti World Bank dan OECD. Di dalam deretan dokumen kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka merepresentasikan pendidikan sebagai entitas pendukung aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan. Pendidikan dalam hal ini disempitkan maknanya pada pembangunan sumber daya manusia unggul guna menghadapi era ekonomi berbasis pengetahuan. Akan tetapi, seperti yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya, representasi ini tidak berlangsung secara total. Dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis, narasi ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM unggul memang menjadi *order of discourse*. Sebagai *order of discourse*, wacana ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM unggul mendominasi serta meminggirkan cara berpikir, makna, dan representasi pendidikan lainnya. Namun, itu bukan berarti membuatnya menjadi satu-satunya substansi yang eksis di dalam diskursus dan praktik pendidikan di era Jokowi. Substansi kecil ini akan didedah pada bagian selanjutnya, saat ini kita berupaya menyelami *order of discourse* wacana dan praktik pendidikan di era Jokowi: ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM unggul.

Analisis Teks

Keinginan menyesuaikan diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan serta penciptaan sumber daya manusia termaktub dalam untaian kalimat di berbagai macam dokumen penting yang membahas pendidikan. Di dalam *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI) dijelaskan bahwa:

“...pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)

Dalam untaian kalimat yang berasal dari dokumen MP3EI di atas, pemerintah tidak hanya mencatumkan kultivasi SDM sebagai cita-cita utama tapi mengakomodasi wacana ekonomi berbasis pengetahuan. Narasi ekonomi berbasis pengetahuan dipandang sebagai sebuah keharusan yang mau tak mau mesti dihadapi. Dalam konteks itu, pendidikan memegang peran kunci untuk mencetak sumber daya manusia dan memberikan solusi.

Beralih ke dokumen selanjutnya, penciptaan sumber daya manusia kembali menjadi perhatian utama bersama dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Hampir sama seperti MP3EI, *Visi Indonesia Emas 2045* juga menyuguhkan gradasi pengudaran ekonomi berbasis pengetahuan dan nuansa produksi sumber daya manusia:

“Selain itu, ekonomi berbasis pengetahuan yang semakin meningkat bertumpu pada inovasi teknologi, mensyaratkan penduduk berpendidikan lebih tinggi dan menguasai Iptek. Pada tahun 2018, penduduk bekerja berpendidikan tertinggi SMP ke bawah sekitar 58,8 persen. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang meningkat, kebutuhan tenaga kerja terampil semakin tinggi. Tuntutan untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan untuk jenis-jenis keahlian dan keterampilan tertentu meningkat dan harus dipenuhi.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

Lagi-lagi, diskursus yang dikembangkan tidak jauh dari topik ekonomi berbasis pengetahuan. Solusinya pun juga menghampiri pendidikan guna meningkatkan keterampilan pekerja di masa mendatang.

Entah kebetulan atau disengaja, Rencana Strategis yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ternyata juga memberikan penekanan pada konteks penciptaan sumber daya manusia.

“Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter” (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

Di situ dipaparkan dengan jelas bahwa kompas pembangunan Indonesia sampai tahun 2024 berfokus pada lanskap pendidikan dan kebudayaan. Artinya, hingga waktu

tersebut, pembangunan Indonesia pasti mengarah pada pembentukan sumber daya manusia lewat pendidikan dan kebudayaan.

Di tempat lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkata bahwa:

“Pembangunan pendidikan tinggi akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat jika mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil yang dibutuhkan masyarakat, dunia usaha/industri, serta bangsa dan negara.” (Handini et al., 2021)

Jika diperhatikan dengan seksama, empat kutipan yang baru saja disajikan mengandung urutan kronologis. MP3EI merupakan kitab pembangunan yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada tahun 2011; *Visi Indonesia Emas 2045* dipublikasikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019; *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi* dibuat tahun 2020; *Pendidikan Tinggi: Kemarin, Kini, dan Esok* muncul tahun 2020. Dari runtutan yang sangat rapi tersebut dapat dipahami bahwa fungsi pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia berkualitas dan terampil sejatinya sudah dicanangkan jauh-jauh hari sebelum Jokowi berkuasa. Sejak dipimpin SBY, pemerintah pusat telah menyadari adanya pergeseran global yang mengharuskan Indonesia berbenah untuk menghadapinya. Jadi, ini merupakan proyek jangka panjang. Perencanaannya sudah diatur pada pemerintahan SBY dan mencapai puncaknya saat Jokowi menjadi pemimpin pemerintahan.

Selanjutnya, tampak bahwa keempat dokumen tersebut menitikberatkan pada diskursus ekonomi berbasis pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan sebagai solusi atas permasalahan kontemporer Indonesia. Terma-terma seperti “ekonomi berbasis pengetahuan”, “penciptaan sumber daya manusia”, “produktivitas” mengokupasi hampir semua bagian di dalam teks. Frasa “ekonomi berbasis pengetahuan”, contohnya, muncul sebanyak empat kali di dalam empat dokumen yang diulas di bagian ini; “sumber daya manusia” tampil dengan total 48 kali; “produktivitas” timbul sebanyak 53 kali.

Jumlah kata pada dasarnya tidak hanya mengindikasikan aspek kuantitatif, banyaknya frasa yang berhubungan dengan “ekonomi berbasis pengetahuan”, “sumber daya manusia”, dan “produktivitas” menandakan adanya usaha konstruksi representasi lewat aktivitas pemilahan kata (diksi) dan diskursus. Dengan kata lain, ada pemahaman yang ingin dibangun lewat pemakaian konsep-konsep tersebut. Representasi yang ada di dalam teks merupakan barang jadi yang sudah disaring terlebih dahulu (Stuart Hall, 2003). Artinya, representasi hanya menampilkan pembahasan-pembahasan yang dinilai penting dan signifikan bagi pembuat teks (Stuart Hall, 2003). Dalam konteks empat dokumen yang dikupas di sini, ekonomi berbasis pengetahuan, penciptaan sumber daya manusia berkualitas, dan peningkatan produktivitas bangsa menjadi representasi utama atau *order of discourse*. Ketiganya disejajarkan serta dipadukan guna mengkerangkai pemahaman fungsi ekonomi pendidikan—ada semacam intertekstualitas dan interdiskursivitas yang mengkoordinasikan konsep ekonomi berbasis pengetahuan dan kultivasi SDM unggul menjadi sebuah narasi bermakna. Pada setiap dokumen terlihat bagaimana pemerintah memposisikan pendidikan: sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan, sebagai

alat untuk mencetak sumber daya manusia, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi bangsa. Apabila digabung menjadi satu, maka bunyi argumen utamanya kira-kira seperti ini: di dalam agenda pembangunan Indonesia, pendidikan direpresentasikan sebagai medium pencetak sumber daya manusia dan upaya peningkatan produktivitas warga negara agar Indonesia dapat beradaptasi dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang mengandalkan produksi aset tak bernilai seperti paten, merek dagang, properti intelektual, dsb.

Tengok misal naskah Kajian Akademik Pengembangan Profil Pelajar Pancasila yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Di situ diungkapkan secara jelas tujuan utama pendidikan Indonesia:

“Sebagai suatu tujuan besarluaran utama (*ultimate goals*) yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional, Profil ini dirancang berdasarkan satu pertanyaan besar, yaitu “pelajar dengan profil—karakter dan kompetensi—apa yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia?”. Pertanyaan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi dan karakter untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di Abad 21, di mana mereka dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa juga pembangunan global yang berkelanjutan, industri 4.0, serta tangguh dalam menghadapi perubahan yang kompleks, tidak stabil, ambigu, dan tidak pasti.” (Anggraena et al., 2020)

Kutipan di atas merangkum secara lugas tujuan utama pendidikan Indonesia. Di situ disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan Indonesia adalah menciptakan manusia yang unggul dan produktif serta tangguh dalam menghadapi turbulensi perubahan yang kompleks, tidak stabil, ambigu, dan tidak pasti.

Selain, jumlah kata dan pemilihan diksi, aspek tekstual lain yang perlu mendapat perhatian lebih adalah genre. Genre mengandaikan adanya relasi semantik dan relasi gramatikal antar kalimat atau paragraf yang menjadi bagian penting dari sebuah teks kebijakan. Dalam hal ini kita berbicara mengenai relasi semantik tingkat tinggi (*higher-level semantic relations*), yakni satu cara mengorganisir teks secara global menggunakan genre (Fairclough, 2003). Salah satu variasi relasi semantik tingkat tinggi yang umum digunakan adalah “*problem-solution*” dan “*goal-achievement*”.

Beberapa dokumen kunci yang menjadi fondasi kebijakan pendidikan saat ini, bila ditelusuri lebih lanjut, banyak mendayagunakan relasi “masalah-solusi” sebagai pemandu teks. Dokumen MP3EI, misalnya, merekomendasikan penciptaan pendidikan dan pelatihan yang mendukung kultivasi sumber daya manusia agar Indonesia sanggup beradaptasi cepat dengan perkembangan sains dan teknologi. Setelah mengurai secara panjang lebar mengenai tantangan yang dihadapi oleh pembangunan Indonesia, penyusun MP3EI kemudian menghadirkan solusi berupa pengembangan SDM.

“Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan,

kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)

(Masalah/Tantangan)

“Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)

(Solusi)

Di tempat lain, *Visi Indonesia Emas 2045* menampilkan relasi semantik yang tak jauh beda. Pertama-tama, kita menemukan pembahasan mengenai permasalahan atau problematika tingkat sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia. Sesudah itu, penulis dokumen menghela penjelasan tentang alternatif yang kira-kira bisa diberikan untuk mengatasi prahara tersebut. Rekomendasi tersebut merupakan arahan kebijakan yang dihasilkan dari diskursus ekonomi berbasis pengetahuan.

“Negara maju yang saat ini telah memasuki era revolusi industri 3.0 dan 4.0 akan fokus pada industri yang didominasi oleh otomatisasi dan perangkat produksi yang dikendalikan melalui sistem berbasis internet. Perkembangan ini sejalan dengan penurunan ketersediaan pekerja pada negara maju yang telah memasuki era *aging population*. Jenis produk yang dihasilkan oleh negara tersebut adalah *high value* dan *customized product*. Negara berkembang akan beralih dari era industri 2.0 menuju industri 3.0, dimana kebutuhan terhadap pekerja terampil (*skilled workers*) semakin tinggi. *Emerging economies* akan berada pada era industri 3.0, dimana industri dengan pola *mass production* akan berjalan seiring dengan *customized product* yang diproduksi secara efisien dengan dukungan perangkat elektronik dan robotik.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

(Masalah)

“Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan investasi pembangunan pendidikan yang lebih besar, pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi, dan pengembangan pendidikan tinggi melalui program diploma (tidak harus S1) berdasarkan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.” (Kementerian PPN/Bappenas, 2019)

(Solusi)

Apa signifikansi dari model “*problem-solution*” tersebut? Layaknya jumlah kata dan pemilihan diksi, relasi tersebut mengandaikan adanya upaya konstruksi pemahaman lewat representasi dan seleksi wacana. Karena sudah melewati tahapan

seleksi, problematika dan rekomendasi yang ditampilkan oleh produsen teks sangat spesifik. Dalam dua contoh di atas, misalnya, interpretasi mengenai masalah sangat kental dengan prahara yang berkorelasi dengan konsep-konsep sumber daya manusia seperti belum terpenuhinya profil tenaga kerja terampil dan tingkat pendidikan rendah warga negara. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian dihubungkan dengan kurangnya kualitas pendidikan, kesehatan, serta absennya akses kepada infrastruktur dasar. Ketika masalah yang dipotret bernuansa *human capital*, maka tak heran bila solusi yang timbul tidak jauh-jauh dari pengembangan sumber daya manusia. Upaya peningkatan sumber daya manusia itu juga hampir selalu berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pada potongan kutipan di atas, misalnya, usaha kultivasi sumber daya manusia termanifestasikan lewat perbaikan pelayanan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan (kurikulum pembelajaran, substansi pengajaran, model penilaian). Efek langsung dari representasi itu adalah terbangunnya pemahaman dan pandangan dunia pembaca. Melalui teks yang telah disadur sedemikian rupa, produsen teks mampu meyakinkan pembaca (secara khusus) dan masyarakat Indonesia (secara umum) bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah besar yang mesti segera diselesaikan lewat pembangunan sumber daya manusia yang dikerjakan melalui upaya peningkatan kualitas dan perbaikan sistem pendidikan.

Narasi "*problem-solution*" yang digaungkan pada dua dokumen kebijakan tadi pada taraf selanjutnya menjadi kenyataan dengan diterapkannya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pada diri Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kita dapat melihat ruh dan praktik sejati posisi pendidikan di dalam agenda pembangunan Indonesia: sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan, sebagai alat untuk mencetak sumber daya manusia, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi bangsa. Hal itu terlihat pada penjelasan program Kampus Merdeka yang tertera pada laman Kemendikbudristek dan diskursus yang membangun penjelasan tersebut.

Di dalam presentasinya, Nadiem Makarim memperkenalkan empat kebijakan pokok Kampus Merdeka: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, PTNBH, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Menurut Nadiem Makarim, paket kebijakan tersebut dibuat karena

"Pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul. Kenapa? Karena jangka waktu keluar dari Perguruan Tinggi sampai di dunia nyata untuk bisa membangun Indonesia itu yang tercepat. Potensi kalau kita bisa meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi kita terutama S1 di mana kebanyakan mahasiswa kita ada di S1. Ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM unggul. Pendidikan Tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan dia harus berinovasi lebih cepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah." (Nadiem Makarim, 2020)

Lagi dan lagi, kita di sini berpapasan dengan kosa kata SDM. Secara khusus, Nadiem menekankan pentingnya peran pendidikan tinggi guna mempercepat pembangunan SDM unggul.

Guna mempercepat pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, Kemendikbudristek membuat kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang

merombak sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Lewat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka seorang mahasiswa bisa mengambil aktivitas di luar kelas atau perkuliahan selama tiga semester; opsi yang pada periode sebelumnya tidak pernah ditemukan. Adanya Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan sanggup mendekatkan perguruan tinggi dengan pihak eksternal seperti perusahaan sehingga *link and match* dapat tercipta. Ketika *link and match* terwujud, peserta didik diekspektasikan mampu mengasah keterampilannya dengan baik bersama perusahaan atau organisasi lainnya yang dirasa dapat memberikan rambu-rambu kontekstualisasi ilmu pengetahuan dalam dunia praktik. Hal ini, jika kita menilik kembali paragraf-paragraf sebelumnya, sangat sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam diskursus “*solution*” pada MP3EI dan Visi Indonesia 2045. Spirit dan semangat yang dibawa oleh Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak jauh berbeda dengan narasi “investasi pembangunan pendidikan”, “peningkatan kualitas pendidikan”, dan “perubahan sistem pendidikan” yang tertera dalam dokumen MP3EI dan Visi Indonesia 2045.

Interpretasi Wacana

Retorika SDM unggul ini, bila dilacak lebih jauh, merupakan salah satu poin penting yang disampaikan Jokowi pada pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya berjudul “Visi Indonesia”: “Yang kedua, kita akan menggeser yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan”. Jadi, program Kampus Merdeka ini sebetulnya adalah derivasi langsung dari visi dan misi yang disampaikan oleh Jokowi. Pada saat mengungkapkan visi dan misinya, Jokowi menggunakan anagram yang pragmatis dan praktis. Dia menginginkan pendidikan Indonesia memainkan peran sebagai penyokong pembangunan SDM unggul. SDM unggul ini, bagi Jokowi, menjadi prasyarat masa depan Indonesia yang gemilang.

Pada tataran ide dan konseptual, dorongan utama kebijakan Kampus Merdeka adalah penciptaan ekosistem pendidikan yang memungkinkan universitas berkembang menjadi situs produksi SDM unggul yang mampu meningkatkan kapabilitas mahasiswa/nya. Dorongan itu kemudian direalisasikan oleh Kemendikbudristek dalam bentuk kebijakan Kampus Merdeka yang bernuansa sangat industrial. Salah satu varian kebijakan Kampus Merdeka yang menyulut banyak perdebatan karena tendensi industrialnya adalah hak belajar tiga semester di luar prodi (Suwignyo, 2023; Suyitno, 2023).

Pada laman resminya, Kemendikbudristek menulis delapan ragam kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa/nya selama tiga semester: Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, ISMA, Praktisi Mengajar, Bangkit, dan Gerilya. Kedelapan cabang Kampus Merdeka tersebut dirancang untuk merespon adanya *missmatch* antara perguruan tinggi dan dunia industri. Karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan oleh universitas dan apa yang dibutuhkan industri maka pemerintah merasa wajib mengatur ulang navigasi universitas lewat praktik *link and match*.

Kampus Merdeka, dengan demikian, mengandaikan adanya *spillover* dari merekatnya relasi perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Cara berpikir seperti itu lahir dari logika yang amat sederhana: masalah ketidakcocokan atau gap antara kredensial pendidikan dan kebutuhan skill dapat diselesaikan melalui

program yang dapat memperbaiki atau menambah keterampilan mahasiswa/ (Amsden, 2010). Dalam kajian pembangunan, model penyelesaian masalah tersebut biasa disebut sebagai solusi *supply-side* (McQuaid & Lindsay, 2005). Sesuai dengan namanya, model ini fokus pada pembentukan formasi tenaga kerja dengan cara mengadakan pelatihan dan reformasi tata kelola pendidikan agar calon tenaga kerja atau pekerja dapat mengakuisisi kemampuan terkini yang dibutuhkan oleh industri (Adely, Mitra, Mohamed, & Shaham, 2021). Artinya, pendekatan *supply-side* berpendapat bahwa jika pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat intensifikasi pelatihan serta perbaikan pendidikan maka kesejahteraan penduduknya akan baik karena secara logis mereka mampu memperoleh pekerjaan layak terlepas dari ada atau tidaknya lapangan pekerjaan mumpuni (*demand side*).

Opsi MSIB, Wirausaha Merdeka, Bangkit, dan Gerilya, untuk menyebut beberapa, merupakan sampel nyata penerapan paradigma *supply-side* dan *link and match*. Melalui program magang di luar kampus, mahasiswa/ dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya beraktivitas di dunia kerja; dengan keterlibatan itu, mahasiswa/ mengetahui sistem dan budaya yang berlaku dalam dunia kerja. Lebih lanjut, lewat aktivitas magang, mahasiswa/ juga mampu mengetahui serta menyerap keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Hal ini sesuai dengan tujuan program magang di luar kampus: “Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* maupun *soft skills* yang akan menyiapkan mahasiswa agar lebih mantab untuk memasuki dunia kerja dan karirnya”. Penggalan pernyataan tersebut mempertontonkan secara tegas bahwa yang menjadi perhatian utama program magang adalah pembentukan *skill set* peserta. Secara personal, perjumpaan langsung dengan situasi spesifik industrial diharapkan mampu mengembangkan keterampilan subjek didik; secara sistemik, melambungnya kapabilitas mahasiswa/ peserta magang diharapkan sanggup mengatrol kualitas SDM Indonesia.

Sama halnya dengan MSIB, Bangkit juga menggunakan logika *supply-side*. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi ternama seperti Google, Goto, dan Traveloka, Bangkit menawarkan tiga ragam pelajaran: *machine learning*, *mobile development*, dan *cloud computing*. Di akhir program, penyelenggara Bangkit menjanjikan pesertanya bisa “mendapatkan kepakaran teknologi, keterampilan mumpuni, dan penguasaan bahasa Inggris yang dibutuhkan untuk melakukan transisi dari kampus menuju dunia kerja.” Di sini kita kembali disuguhkan dengan anagram “pengembangan keterampilan” sebagai menu utama. Dalam hal ini Bangkit diposisikan sebagai hub atau medium transmisi keterampilan industri teknologi. Sebelas-duabelas dengan program magang, Bangkit pada dasarnya juga mengandaikan cara berpikir serupa: relasi perguruan tinggi dan korporasi informasi dan teknologi yang semakin erat akan menambah volume keterampilan mahasiswa/, di waktu yang sama hal itu bakal berdampak pada proporsi SDM unggul Indonesia.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa baik pada tataran konseptual maupun praktik, Kampus Merdeka sejatinya mementingkan proyek pembangunan SDM unggul. Penggunaan jargon *mismatch* dan *link and match* berfungsi untuk melegitimasi kebijakan Kampus Merdeka yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan peserta didik. Dengan mengikuti berbagai macam kegiatan di luar kampus, mahasiswa/ diharapkan mampu mendapat *skill set* anyar yang akan memperlancar langkah mereka menuju dunia kerja. Pada titik ini, Kampus Merdeka dapat dipandang

sebagai praksis sosial yang menerjemahkan diskursus ekonomi berbasis pengetahuan dan SDM unggul pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi.

Kampus Merdeka merupakan kulminasi dari sederet diskursus yang telah dikembangkan pada masa-masa sebelumnya. Kampus Merdeka, dengan demikian, adalah praktik nyata yang mewujudkan narasi representasi pendidikan yang telah dibangun pada empat dokumen sebelumnya. Karena diskursusnya fokus pada penyesuaian diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM maka kebijakan serta praktik lapangannya tidak akan jauh-jauh dari dua hal tersebut. Kampus Merdeka menjadi bukti sahih bahwa di dalam agenda pembangunan Jokowi, pendidikan difungsikan sebagai alat mencetak SDM unggul, peningkatan produktivitas, dan penyesuaian diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pendidikan di Dalam Agenda Pembangunan Indonesia II: Profil Pelajar Pancasila

Berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa pemerintah pusat, melalui Kemendikbudristek, merupakan dalang utama kebijakan pendidikan yang menaruh perhatian besar pada aspek pembangunan. Kepentingannya pun juga sudah terdeteksi: menciptakan SDM unggul agar Indonesia dapat beradaptasi dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan menjadi bangsa yang lebih produktif. Tetapi apakah memang kepentingannya hanya satu itu saja?

Jawabannya tentu saja tidak. Diskursus dan praktik pendidikan pada periode Jokowi bergerak di antara dua pendulum. Titik kepentingan pertama dan yang paling dominan adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM unggul, titik kepentingan yang kedua adalah menciptakan Profil Pelajar Pancasila.

Produksi Teks

Profil Pelajar Pancasila pada dasarnya merupakan program yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran. Kebimbangan pertama merujuk pada pertanyaan seputar apakah pelajar Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sedangkan kegamangan yang kedua berkisar pada bagaimana pelajar Indonesia menavigasikan diri dalam perkembangan global. Jawaban atas kekhawatiran yang pertama telah ditemukan di bagian sebelumnya. Tanggapan terkait kebuncahan yang kedua termanifestasikan dalam Program Profil Pelajar Pancasila yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada proses produksi teks, perintisan Program Profil Pelajar Pancasila dilandasi oleh satu pertanyaan besar: “pelajar dengan profil—karakter dan kompetensi—apa yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia?”. Dalam dokumen *Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila* ditulis bahwa “pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila”. Dari penggalan kalimat itu tampak jelas bahwa peningkatan dimensi kognitif harus diimbangi dengan budi pekerti luhur yang tercermin dalam lima sila Pancasila. Manusia Indonesia yang berkompoten saja tidak cukup, dia juga harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar budi pekertinya baik. Sekilas, infiltrasi Pancasila ke dalam dunia pendidikan Indonesia terlihat seperti hal yang sangat biasa sebab pada perjalanannya di era Reformasi Pancasila sudah merasuk melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN). Namun, meski telah eksis dalam wujud materi di dalam mata pelajaran PPKN, keberadaan P5 menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena jangkauan programnya sangat besar.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa Pancasila tiba-tiba menjadi salah satu program besar di dalam bentala pendidikan di Indonesia?

Jawaban dari pertanyaan tersebut erat kaitannya dengan salah satu pemahaman dasar studi kebijakan kritis: produksi teks tidak pernah lepas dari *setting* institusional dan *order of discourse* yang dipegang oleh lembaga terkait. Maka, mengikuti cara berpikir itu, kita mesti menelusuri tujuan program P5 pada lanskap institusional dan wacana yang bergulir di dalam Kemendikbudristek.

P5 secara umum berkorelasi dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dirintis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara etimologi dan konseptual, Merdeka Belajar mengambil konsep “merdeka” yang diturunkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Menurut Ki Hadjar Dewantoro, kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib-damai serta selamat dan bahagia, berdasarkan kesusilaan hidup manusia. Di sini potongan kalimat berupa “berdasarkan kesusilaan hidup manusia” perlu digarisbawahi karena inilah pokok yang diambil sebagai dasar berpijak penyusunan P5. “Berdasarkan kesusilaan hidup manusia” menggambarkan aspek budi pekerti dan pengembangan karakter, dimensi lain pemikiran Ki Hadjar Dewantoro yang dicatut oleh Merdeka Belajar. Selain menjadi manusia yang mandiri, pelajar Indonesia harus memiliki budi pekerti luhur agar perkembangan kognitifnya tidak membawanya ke tepi jurang imoralitas.

Karsa pengembangan karakter dan pembentukan pelajar berbudi luhur itu, menurut Kemendikbudristek, dapat dipenuhi oleh Pancasila. Di dalam lima sila Pancasila terdapat butir-butir keteladanan yang bisa dijadikan acuan untuk menuntun pengembangan karakter peserta didik. Sila pertama, misalnya, mengajarkan pentingnya aspek keagamaan dalam menuntun adab dan perilaku manusia; sila kedua menanamkan pentingnya empati terhadap sesama dan hubungan horizontal antar manusia; sila ketiga menekankan kesatuan sebagai prasyarat bangsa yang kuat; sila keempat menawarkan musyawarah sebagai model keputusan kebijakan yang mencoba meredam konflik ekstrem; sila kelima mengajarkan pemerataan sosial-ekonomi yang bermanfaat bagi keberlanjutan kehidupan manusia Indonesia. *All in all*, lima sila Pancasila menyediakan wadah yang sangat tepat untuk membangun karakter dan budi pekerti pelajar Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, proses produksi diskursus Profil Pelajar Pancasila dideterminasi oleh Merdeka Belajar dan narasi “merdeka” milik Ki Hadjar Dewantara yang dipakai sebagai fondasi kebijakan. Sikap merdeka yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara mensyaratkan adanya pengembangan karakter dan budi pekerti. Dua poin tersebut dipercaya dapat tercapai apabila Pancasila dimasukkan ke dalam proyek pendidikan di Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat lima buah sila yang dirasa mampu menerjemahkan substansi pengembangan karakter dan pembentukan budi pekerti yang dikonsepsikan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Analisis Teks

Secara teoretis, Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya pemerintahan Jokowi memadukan tujuan praktis pendidikan dengan nilai-nilai luhur khas Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila. Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tujuan praktis pendidikan terejawantahkan dalam proyek pembangunan SDM unggul dan penyesuaian diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Berlakunya tujuan

praktis itu diharapkan mampu melahirkan calon tenaga kerja yang terampil dan siap berkecimpung di ranah profesional.

Pada perkembangannya, penciptaan manusia yang memiliki kompetensi jempolan saja ternyata tidak cukup. Pemerintah, lewat Kemendikbudristek, merasa bahwa insan Indonesia juga perlu memiliki sifat, sikap, dan perangai yang mencerminkan identitas khas bangsa Indonesia. Perpaduan antara keduanya tersusun rapi dalam kutipan di bawah ini:

“Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.” Pernyataan ini memuat tiga frasa kunci: pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan karakter dan perilaku nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia; dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan Abad 21.” (Anggraena et al., 2020)

Melalui perintisan Profil Pelajar Pancasila, pemerintah mencoba mengkombinasikan kebutuhan kompetensi terkini dengan kepribadian khas Indonesia. Sintesis tersebut dilakukan agar

“setiap pelajar Indonesia melampaui kemampuan-kemampuan teknis pragmatis, melainkan kemampuan mendasar yang dibutuhkan untuk beradaptasi, berpartisipasi, dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia Abad 21. Pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan pikir, tetapi memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki manusia yang meliputi kecerdasan rasa, karsa, cipta dan karya, atau yang disebut sebagai “manusia seutuhnya” ... Manusia seutuhnya inilah yang akan menjadi insan-insan yang berkomitmen untuk menggunakan segenap pengetahuan dan keterampilannya untuk memajukan peradaban dan kebudayaan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila.” (Anggraena et al., 2020)

Premis-premis yang melatarbelakangi Profil Pelajar Pancasila terlampir dengan jelas pada kutipan di atas. Premis pertama: pelajar Indonesia dapat melampaui asumsi teknis-pragmatis yang melekat dalam kegiatan pembelajaran; premis kedua: aprosiasi nilai-nilai Pancasila disemogakan mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial bangsa Indonesia.

Dua premis tersebut kemudian ditranslasikan dalam program khusus bernama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Menyitir Kemendikbudristek, P5 dibuat untuk mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Lewat P5, guru diharapkan dapat menemani proses pembelajaran siswa agar mampu menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijelaskan dalam Profil Pelajar Pancasila. Pada pelaksanaannya, P5 menyediakan berbagai macam pilihan tema kegiatan yang bisa dipilih guru dan murid. Setiap jenjang memiliki tema tersendiri. Tingkatan PAUD, misalnya, dapat memilih ragam aktivitas seperti Aku Sayang Bumi,

Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku (Sufyadi et al., 2021). Sementara itu, level dasar, menengah, dan atas menawarkan deretan kegiatan seperti Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhineka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi, Rekayasa dan Teknologi, Kewirausahaan (Sufyadi et al., 2021).

Masuknya pertimbangan mental dalam kebijakan pendidikan ala Jokowi memiliki makna dan signifikansi tersendiri. Signifikansinya terletak pada penekanan terhadap aspek karakter dan kepribadian individu. Digamitnya dua dimensi tersebut menggambarkan ciri khas kebijakan publik di Indonesia yang ingin mengikuti perkembangan global sekaligus memegang kuat budaya dan tradisi lokalnya (Ledger, Vidovich, & O'Donoghue, 2015). Dalam konteks Profil Pelajar Pancasila dan P5, pemerintah menginginkan generasi penerus bangsa mengakuisisi keterampilan paling *up-to-date* supaya dapat berselancar di dunia kerja dan secara bersamaan menyemai karakter serta kepribadian yang diperlukan guna menjadi manusia baru nun berhati putih dan berkemauan baja.

Lebih lanjut, aspek karakter dan kepribadian diperhitungkan sebab pemerintah ingin menanggulangi kemerosotan perilaku dan menyelesaikan masalah sosial lewat kultivasi cara pandang serta sikap mulia anak muda—seseorang yang di masa depan akan mengisis pos-pos strategis di berbagai sektor. Hal itu tertera secara gamblang pada deskripsi tema yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Pada aktivitas Rekayasa dan Teknologi, Kemendikbudristek menulis:

“Peserta didik dapat membangun budaya *smart society* dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi.”

Di tempat lain, saat membahas kegiatan Kewirausahaan, Kemendikbudristek menekankan manfaat program Kewirausahaan:

“Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi *problem solver* yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas.”

Dua penggalan kutipan di atas memperlihatkan bagaimana program P5 dipupuk untuk memperkenalkan anak dengan kondisi riil yang eksis di lingkungan tempat mereka tinggal. Setelah mengobservasi kenyataan hidup, peserta didik diajak mendeteksi permasalahan sosial dan menyelesaikannya lewat berbagai macam cara serta medium. Keterlibatan aktif anak dalam rangka menciptakan solusi berhubungan erat dengan cita-cita keadilan sosial yang menjadi landasan program P5.

Interpretasi Wacana

Infiltrasi Profil Pelajar Pancasila dan P5 mengindikasikan bahwa tidak semua program pendidikan pada masa Jokowi mengarah kepada kepentingan industrial yang sangat vulgar. Melalui perancangan Profil Pelajar Pancasila dan P5, Kemendikbudristek berusaha mendamaikan dua kutub yang jaraknya sedikit bertolak belakang: proklivitas pragmatis dan kondisi mental serta kepribadian subjek didik. Artinya, berkaitan dengan narasi dan praktik pendidikan, kebijakan pendidikan di era

Jokowi tidak mengambil tren perkembangan masa kini secara apa adanya (*taken for granted*) dan tanpa modifikasi. Kebutuhan mengikuti perkembangan kontemporer mesti diimbangi dengan rejuvenasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan manusia Indonesia akan percuma bila peserta didik pada akhirnya hanya menjadi insan yang cerdas namun acuh terhadap sesama, tak punya adab, dan defisit mental.

Oleh karena itu, ketika ingin melakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan Indonesia di era Jokowi, kita mesti berhati-hati sebab intensi pragmatis yang ada pada diskursus ekonomi berbasis pengetahuan dan pembangunan SDM unggul ternyata tidak pernah berdiri sendiri. Ia didampingi oleh narasi lainnya yakni Pancasila. Posisi Pancasila di sini sangatlah krusial. Selain berguna sebagai wacana populer yang dapat diterima oleh semua pihak, Pancasila merupakan piranti kompromis agar pemerintah tidak terlihat sebagai sosok pragmatis *per se*. Sebagai wacana yang begitu populer di masyarakat, Pancasila setidaknya dapat meredam kegelisahan di kalangan pemerhati pendidikan dan pengajar mengenai arah pendidikan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, kritikus serta pengajar sering menyuarakan kegamangannya perihal pragmatisme pendidikan (Prasetyo, 2004). Bila bersandar hanya pada aspek kognitif saja mereka khawatir anak muda Indonesia tidak akan memiliki kapasitas moral yang cukup untuk membawa kemaslahatan bagi sesama. Dalam hal ini, mereka mengandaikan bahwa kepemilikan dimensi kognitif tanpa dibarengi dengan keahlian mengolah rasa berpotensi membuat degradasi moral (*moral hazard*) yang berujung pada kasus-kasus amoral seperti korupsi, skandal asusila, dsb (Tilaar, 2009). Maka dari itu, guna mengimbangi tuntutan pragmatis-industrial, pendidikan Indonesia perlu ditambahi agenda penanaman karakter dan kepribadian supaya generasi masa depan tidak terjerumus pada kepentingan individual dan sektoral. Pancasila, dengan segala rupa pemaknaan dan implementasinya, menyediakan sumber bagi upaya tersebut.

Di sisi yang lain, Pancasila juga berperan sebagai topeng untuk memperhalus gradasi tujuan pendidikan Indonesia yang menjurus pada kepentingan *supply-side* atau penciptaan tenaga kerja. Kebijakan pendidikan yang terlalu ekstrem dan tidak populer tentu bakal menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Kita tentu masih ingat bagaimana mahasiswa dan pegiat pendidikan berbondong-bondong datang ke MK melayangkan gugatan terhadap UU BHP pada tahun 2010 yang dinilai sebagai upaya paling komprehensif untuk mengubah tata kelola pendidikan di semua jenjang menjadi layaknya swasta (Darmaningtyas, Edi Subkhan, & Fahmi Panimbang, 2014). Setelah kejadian itu, pemerintah sedikit melunak. Dari rencana awal menyasar semua jenjang pendidikan, pemerintah mengalihkan fokus pada perguruan tinggi lewat UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Hal yang sama juga kita jumpai di sini. Pada taraf pendidikan tinggi, pemerintah gencar menetapkan stipulasi yang berbau neoliberal dalam bentuk Kampus Merdeka. Sementara itu, pada jenjang dasar, menengah, hingga atas, pemerintah menyisipkan narasi Pancasila dengan harapan para siswa dapat melampaui kemampuan teknis-pragmatis dan menjadi manusia berkepribadian serta berintegritas. Dengan kata lain, pendidikan Indonesia di era Jokowi sesungguhnya bermain di antara dua keping kepentingan: di satu sisi pemerintah ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman lewat kultivasi SDM unggul, di sisi lain pemerintah juga ingin anak muda yang sanggup mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari

KESIMPULAN

Melalui analisis tekstual dan senarai diskursus yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam agenda pembangunan Jokowi pendidikan mempunyai dua fungsi utama. Pertama, pendidikan diberdayakan untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi berbasis pengetahuan dan membangun SDM unggul. Kedua, pendidikan dijalankan guna menciptakan Profil Pelajar Pancasila yang atentif terhadap perkembangan zaman (pembelajar sepanjang hayat) dan mampu melestarikan identitas khas bangsa Indonesia yang termaktub dalam lima sila Pancasila. Fungsi yang pertama dilaksanakan melalui kebijakan Kampus Merdeka dan berfokus pada jenjang perguruan tinggi, sedangkan tujuan yang kedua dilakukan lewat program P5 dan fokus pada jenjang dasar sampai atas.

Berdasarkan temuan tersebut, kita dapat menjawab dua pertanyaan yang telah diajukan di awal tadi. Pertama, diskursus dan praktik sosial yang begitu dominan dalam kebijakan pendidikan di era Jokowi adalah pembangunan modal manusia dengan kecenderungan pada penyiapan keterampilan tenaga kerja melalui serangkaian program magang dan pelatihan (*supply-side*). Diskursus dan praktik sosial itu menjadi dominan karena Indonesia dihadapkan dengan perkembangan teknologi serta era baru bernama ekonomi berbasis pengetahuan yang menuntut adanya *reskilling* dan *upskilling* pekerja. Program *reskilling* serta *upskilling* dibutuhkan agar pekerja saat ini dan calon pekerja di masa depan dapat menguasai keterampilan kontemporer sehingga tidak tergantikan oleh AI, robot, dan teknologi lainnya.

Dua proposisi tersebut didukung oleh penjelasan mengenai proses produksi, analisis teks, dan interpretasi wacana. Pada ranah produksi teks, diskursus pendidikan di Indonesia yang termaktub di dalam dokumen kebijakan dideterminasi oleh latar kepentingan institusional dan narasi global serta lokal. Diskursus yang pertama—

pengembangan SDM—diilhami oleh perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan kebutuhan pemerintah menyongsong datangnya tren tersebut, sedangkan penciptaan Profil Pelajar Pancasila dilatarbelakangi oleh falsafah “merdeka” yang diambil dari Ki Hadjar Dewantara serta keinginan membuat keseimbangan antara aspek kognitif dan budi pekerti. Sementara itu, pada lanskap analisis teks, penulis telah menunjukkan bagaimana jumlah dan pemilihan kata, seleksi representasi diskursus, serta genre “*problem-solution*” berhasil membentuk dokumen kebijakan yang koheren, saling terkait, dan menguatkan satu sama lain. Secara sederhana, manuskrip kebijakan yang ditelaah di sini berhasil membentuk intertekstualitas dan interdiskursivitas. Terakhir, melalui interpretasi wacana, ditemukan bahwa kepentingan pembangunan SDM sangat melekat pada jenjang perguruan tinggi dan mulai digalakkan sejak dimulainya periode kedua Presiden Jokowi sedangkan agenda penciptaan Profil Pelajar Pancasila diterapkan secara masif pada jenjang sekolah dasar hingga menengah dan diimplementasikan guna mengimbangi dorongan industrial-pragmatis di level universitas.

Meskipun sudah menyelesaikan tugas pokoknya (menjawab pertanyaan penelitian), penelitian ini perlu menyampaikan beberapa keterbatasan dan prospek kajian di masa depan—keduanya bertalian sangat erat. Riset ini menggunakan sepenuhnya sumber sekunder untuk menyingkap fungsi pendidikan di era Jokowi. Melalui investigasi terhadap dokumen pemerintah mengenai pendidikan dan analisis kebijakan Kampus Merdeka serta P5, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua agenda utama pendidikan di era Jokowi.

Kesimpulan itu tampaknya perlu diperdalam lewat penelusuran empiris untuk mendapat gambaran yang lebih komplisitas atas kondisi pendidikan di Indonesia saat ini serta menghindari tendensi reduksionisme. Menggunakan model analisis wacana kritis Normain Fairclough, penelitian ini telah mencoba memberikan pemahaman atas pendidikan di Indonesia melalui sumber pengetahuan berupa memori dan testimoni namun belum mengakomodasi penelusuran empiris (Moser, 2011). Oleh karena itu, untuk melengkapi usaha tersebut, kajian ke depan dapat memperdalam analisis di sini dengan cara melakukan penelitian bernuansa empiris. Peneliti perlu datang langsung ke ruang kelas mengamati bagaimana subjek didik, pengajar, serta berbagai aktor di dalamnya berinteraksi membentuk sebuah realitas bernama “pendidikan” (Latour, 2005). Pengamatan yang bersifat mikro itu kemudian mesti disambungkan dengan analisis makro sehingga kita dapat mengetahui sambungan antara unsur abstrak (konsep) dan empiris (entitas nyata yang mengkonstruksi konsep). Hanya dengan cara seperti itu kita akan merengkuh “realitas” yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adely, F. I. J., Mitra, A., Mohamed, M., & Shaham, A. (2021). Poor education, unemployment and the promise of skills: The hegemony of the “skills mismatch” discourse. *International Journal of Educational Development*, 82, 102381. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102381>
- Amsden, A. H. (2010). Say’s Law, Poverty Persistence, and Employment Neglect. *Journal of Human Development and Capabilities*, 11(1), 57–66. <https://doi.org/10.1080/19452820903481434>

- Anggraena, Y., Sufyadi, S., Maisura, R., Chodidjah, I., Takwin, B., Surya Cahyadi, ... Sri Kurnianingsih. (2020). *Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila* (pp. 1–111). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ball, S. J. (2007). *Education plc: Understanding private sector participation in public sector education*. London ; New York: Routledge.
- Chen, D. H. C., & Dahlman, C. J. (2006). *The Knowledge Economy, The Kam Methodology, And World Bank Operations*. 1–24.
- Darmaningtyas, Edi Subkhan, & Fahmi Panimbang. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.
- David, P. A., & Foray, D. (2002). An introduction to the economy of the knowledge society. *International Social Science Journal*, 54(171), 9–23. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00355>
- Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2020). *Merdeka Belajar: Kajian Literatur*.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power* (2nd ed). Harlow, Eng.; New York: Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203697078>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2. ed., [Nachdr.]). London: Routledge.
- Fairclough, N., & Fairclough, I. (2012). *Political discourse analysis*. New York: Routledge.
- Gaus, N., & Hall, D. (2015). Neoliberal governance in Indonesian universities: The impact upon academic identity. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 35(9/10), 666–682. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2014-0120>
- Gaus, N., Yunus, M., Karim, A., & Sadia, H. (2019). The analysis of policy implementation models in higher education: The case study of Indonesia. *Policy Studies*, 40(1), 92–109. <https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1539224>
- Handini, D., Zulkifli, D., Hidayat, F., & Herlina, N. (2021). *Pendidikan Tinggi, Kemarin, Kini, dan Esok* (pp. 1–120). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Harris, R. G. (2001). The knowledge-based economy: Intellectual origins and new economic perspectives. *International Journal of Management Reviews*, 3(1), 21–40. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00052>
- Jayanti, G. D., Setiawan, F., Azhari, R., & Putri Siregar, N. (2021). Analisis Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045* (pp. 1–158). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i1.60>
- Kusumadewi, L. R. (2022). *Pendidikan untuk Apa dan untuk Siapa? Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Ledger, S., Vidovich, L., & O'Donoghue, T. (2015). International and Remote Schooling: Global to Local Curriculum Policy Dynamics in Indonesia. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 24(4), 695–703. <https://doi.org/10.1007/s40299-014-0222-1>
- McQuaid, R. W., & Lindsay, C. (2005). The Concept of Employability. *Urban Studies*, 42(2), 197–219. <https://doi.org/10.1080/0042098042000316100>
- Moser, P. K. (Ed.). (2011). *The Oxford Handbook of Epistemology* (Im Kolophon: LaVergne 2011). Oxford: Oxford University Press.
- Mulya, T. W. (2016). Neoliberalism Within Psychology Higher Education in Indonesia: A Critical Analysis. *ANIMA Indonesian Psychological Journal*, 32(1), 1–11. <https://doi.org/10.24123/aipj.v32i1.579>
- OECD. (1996). *The Knowledge-Based Economy* (pp. 1–46). Paris.
- OECD. (2018). *Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy* (pp. 1–173). Paris: OECD.
- OECD. (2021). *OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life*. OECD. <https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en>
- Prasetyo, E. (2004). *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Rosser, A. (2016). Neo-liberalism and the politics of higher education policy in Indonesia. *Comparative Education*, 52(2), 109–135. <https://doi.org/10.1080/03050068.2015.1112566>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Stuart Hall. (2003). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Subkhan, E. (2023). Vocationalizing Education: The Dangers of Link-And-Match Paradigm for the Students' Future. In *Education in Indonesia: Critical Perspectives on Equity and Social Justice* (1st ed., pp. 77–98). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Sufyadi, S., Harjatanaya, T. Y., Adiprima, P., Satria, M. R., Andiarti, A., & Herutami, I. (2021). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Suwignyo, A. (2023). Guncangan Kampus Merdeka. *Kompas*.
- Suyitno. (2023). Kampus Merdeka Berkualitas. *Kompas*.
- Taylor, S. (1997). Critical Policy Analysis: Exploring contexts, texts, and consequences. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 18(1), 23–35. <https://doi.org/10.1080/0159630970180102>

- Taylor, S. (2004). Researching Educational Policy and Change in 'New Times': Using Critical Discourse Analysis. *Journal of Education Policy*, 433–451. <https://doi.org/10.1080/0268093042000227483>
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wang, Y. (2011). Education in a Changing World: Flexibility, Skills, and Employability. *World Bank*.

Article submitted 06 March 2023. Resubmitted 27 July 2023. Final acceptance 31 July 2023.
Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 08, No. 1, 2023